



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS NETRALITAS HAK PILIH POLISI  
REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM  
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH**

**“CHOOSE THE RIGHT JURIDICAL NEUTRALITY STUDY  
OF POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE  
GENERAL ELECTION BY LAW NUMBER 8 IN 2012  
ELECTION OF MEMBERS DPR, DPD AND DPRD”**

**RAHMAT MAULANA WINATA**

**NIM : 07071019065**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

## **SKRIPSI**

**“KAJIAN YURIDIS NETRALITAS HAK PILIH POLISI  
REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM  
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH”**

**“CHOOSE THE RIGHT JURIDICAL NEUTRALITY STUDY  
OF POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE  
GENERAL ELECTION BY LAW NUMBER 8 IN 2012  
ELECTION OF MEMBERS DPR, DPD AND DPRD”**

**RAHMAT MAULANA WINATA  
070710191065**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **MOTTO**

**“KEBANYAKAN DIRI KITA TIDAK MENSYUKURI APA YANG  
SUDAH KITA MILIKI, TETAPI KITA SELALU MENYESALI  
APA YANG BELUM KITA CAPAI”<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Aldus Huxley ([http://www.google.com/Hitamputihkita's Weblog.htm](http://www.google.com/Hitamputihkita's%20Weblog.htm) di akses tanggal 18 september 2013)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibunda (Sri Lilik Tauji Astutik S.Pd) dan Ayahanda (Drs E.Suhaely) yang telah membesarkan dan membekali hidup penulis serta tiada hentinya mendo'akan dengan rasa kasih sayang, kebijaksanaan, dan kemanusiaan.;
2. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang senantiasa memberikan bimbingannya dan pengalamannya dalam pembuatan karya ilmiah ini.

## **PERSYARATAN GELAR**

**“KAJIAN YURIDIS NETRALITAS HAK PILIH POLISI  
REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM  
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH”**

**“CHOOSE THE RIGHT JURIDICAL NEUTRALITY STUDY  
OF POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE  
GENERAL ELECTION BY LAW NUMBER 8 IN 2012  
ELECTION OF MEMBERS DPR, DPD AND DPRD”**

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program Strata Satu  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**RAHMAT MAULANA WINATA**

**NIM. 070710190165**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

**PERSETUJUAN  
SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI  
TANGGAL 30 JANUARI 2014**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**IWAN RACHMAD S.S.H.M.H**

**NIP: 19700410 199802 1 001**

**Pembantu Pembimbing**

**ROSITA INDRAYATI S.H.M.H**

**NIP: 19780531 200501 2 001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**“KAJIAN YURIDIS NETRALITAS HAK PILIH POLISI  
REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM  
MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH”**

Oleh :

**RAHMAT MAULANA WINATA  
NIM. 070710191065**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**IWAN RACHMAD S S.H.M.H**

**NIP: 19700410 199802 1 001**

**ROSITA INDRAYATI S.H.M.H**

**NIP: 19780531 200501 2 001**

Mengesahkan  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.**

**NIP. 19710501 199303 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 30  
Bulan : Januari  
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**TOTOK SUDARYANTO, S.H.M.S.**  
**NIP.19570122982031002**

**WARAH ATIKAH, S.H..M.HUM.**  
**NIP. 197303252001122002**

### **Anggota Penguji :**

**IWAN RACHMAD S S.H.M.H**  
**NIP: 19700410 199802 1 001**

.....

**ROSITA INDRAYATI S.H.M.H**  
**NIP: 19780531 200501 2 001**

.....



## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Maulana Winata

NIM : 070710191065

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“KAJIAN YURIDIS NETRALITAS HAK PILIH POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH”** adalah benar- benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 30 Januari 2014

Yang menyatakan,

Rahmat Maulana Winata

NIM : 070710191065

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“KAJIAN YURIDIS NETRALITAS HAK PILIH POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak IWAN RACHMAD S S.H.M.H selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu ROSITA INDRAYATI S.H.M.H Selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak TOTOK SUDARYANTO,S.H.,M.S. selaku ketua panitia ujian skripsi dan,
4. Ibu WARAH ATIKAH,S.H, M.Hum selaku sekertaris panitia ujian skripsi yang telah bersedia memberikan waktu luangnya untuk menguji skripsi yang masih jauh dari kesempurnaan;

5. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
6. Cewekku tercinta Evi yang selalu mendukung dan memberikan semangat demi terselesaikannya penelitian skripsi ini.
7. Semua teman – temanku Febry Syarif, Fendi Boim, Ardhi Gurami, Wayan, Wenda, Lala, Eva, Mitha, Herni , Ana, Vera, Casmitha dll. yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan membantu penulis dalam setiap langkah menuju arah perbaikan. Akhir kata, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, Januari 2014

Penulis

## **RINGKASAN**

Sepanjang tahun 2013 rakyat Indonesia akan disibukkan dengan maraknya aktivitas kampanye yang akan dilaksanakan oleh para kontestan Pemilu baik kampanye Partai Politik, kampanye calon anggota Dewan Perwakilan Daerah maupun kampanye yang dilaksanakan oleh calon Presiden/Wakil Presiden. Suatu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh Polri adalah bahwa dalam Pemilu 2013 anggota POLRI tidak ada yang bergabung dan ikut serta sebagai calon anggota Legislatif dari parpol-parpol peserta Pemilu 2013.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil Judul “Kajian Yuridis Netralitas Hak Pilih Polisi Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Kemudian dapat terumuskan dan pertanyaan yang harus dijawab adalah, Bagaimanakah pengaturan hukum tentang Hak Pilih Bagi Polri dalam Pemilihan Umum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? dan Bagaimanakah hubungan hukum terhadap hak pilih bagi Polri dengan konsepsi Netralitas Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam konteks masyarakat demokratis di Indonesia?

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami dan mengetahui tentang Sistem Pemilihan Umum yang berjalan di Indonesia, mengetahui tentang bagaimana Hak Pilih Bagi Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia serta mengetahui bagaimanakah Netralitas Hak Pilih Bagi Polri dalam konteks Hak Asasi pada pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif (legal research), artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan yang ada.

Dalam Pembahasan dapat diketahui bahwa, menurut Undang – Undang No. 8 tahun 2012, hak pilih dan memilih bagi anggota Polri dalam Pemilihan Umum dihilangkan sehingga Polri hanya melaksanakan tugas negara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah telah menghilangkan hak dasar berupa hak memilih dan dipilih bagi anggota Polri guna menciptakan situasi yang diinginkan oleh negara.

Undang –Undang No. 8 tahun 2012 dan Tap MPR No. VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri dapat disimpulkan secara tidak langsung negara menindas Hak Asasi Polri dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya keinginan Negara dan mewujudkan Konsep Netralitas kepolisian dalam pelaksanaan Pemilihan umum. Dan berarti belum terdapatnya sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal antara penghapusan hak pilih bagi Polri dengan konsepsi Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat demokratis.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul Depan.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Moto.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Prasyarat Gelar .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Pernyataan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih .....</b>	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan.....</b>	<b>xii</b>
<b>Halaman Daftar Lampiran .....</b>	<b>xiv</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	3
1.3.2 Tujuan Khusus .....	3
1.3.3 Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Tipe Penelitian.....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.5.2 Bahan Hukum Sekunder .....	6

1.5.3 Bahan Non Hukum.....	7
1.6 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Polisi Republik Indonesia .....	8
2.1.1 Istilah Polisi dan Kepolisian Secara Umum .....	8
2.1.2 Istilah Polisi dan Kepolisian menurut Peraturan Yang Berlaku Demokrasi di Indonesia .....	12
2.1.3 Tugas dan Wewenang Polisi.....	13
2.2 Pemilihan Umum .....	17
2.2.1 Pengertian Pemilihan Umum .....	17
2.3 Netralitas Pemilihan Umum.....	21
2.3.1 Pengertian Netralitas Pemilihan Umum .....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Pengaturan tentang Hak Pilih bagi Polisi Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum di Indonesia .....	23
3.1.1 Pengaturan hak Pilih Polri dan Angkatan Bersenjata pada masa Orde Lama .....	24
3.1.2 Pengaturan hak Pilih Polri dan Angkatan Bersenjata pada masa Orde Baru.....	26
3.1.3 Pengaturan Hak Pilih Polri pada Era Reformasi ...	28
3.2 Hubungan Hukum terhadap Hak pilih bagi Polri dengan konsepsi Netralitas Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	31
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>42</b>
4.1 Kesimpulan.....	42
4.2 Saran.....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>45</b>